

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. P. Perlindungan, 1993, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, P.T. Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

Fahmudin Agus, dkk, 2014, *Lahan Gambut Indonesia: Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan*, IAARD Press.

Hartanto Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat*, Cet I, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad Yamin, 2003, *Beberapa Dimensi Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Sembiring Jimmy Joses, 2019, *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zahirin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal

Laily Ratna dan Argo Satriyo Santoso, Perlindungan Hukum kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, 2021.

Maryono Dwi Saputra, Inkonsistensi Kebijakan Antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak Provinsi Riau, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 4 No. 2, 2021.

M. Tartib, Analisis Yuridis Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti), *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XV, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

D. Website

G. Nurcahyadi, “Inisiatif siak hijau, cara kabupaten siak cegah karhutla”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/264353-inisiatif-siak-hijau-cara-kabupatensiak-cegah-karhutla>, dikunjungi pada 22 Agustus 2022 pukul 10.25

Tami, *Lahan Gambut: Pengertian, Fungsi, Sebaran di Indonesia*, <https://mutuinstitute.com/post/lahan-gambut/>, dikunjungi pada 29 September 2022 pukul 16.00 WIB.

